



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK KOTA
SAMARINDA





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SAMARINDA

Nomor :47/SK-RENJA/Sekrt 1.1/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tanggal 20 Agustus 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua Tim : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

- Anggota : 1. Kabid Perlindungan Perempuan
2. Kabid Pemenuhan Hak Anak
3. Kabid Kualitas Hidup Perempuan
4. Kabid Perlindungan Khusus Anak
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
6. Kepala UPTD PPA Kota Samarinda
7. Staf Perencanaan DP2PA

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 5 Januari 2026



Kepala
Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013



KATA PENGANTAR

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan penyusunan dokumen perencanaan OPD yang dilandasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, sehingga sasaran utama penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.

Akhirulkalimat, Semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda, 5 Januari 2026

Kepala Dinas



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP2PA	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP2PA.....	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	49
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2PA	66
3.3 Program dan Kegiatan	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP2PA	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DP2PA	73
BAB V PENUTUP	82



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	12
Tabel 2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025	32
Tabel 2.3 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	51
Tabel 2.4 Tabel Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	57
Tabel 3.1 Diagram IPG Tahun 2020-2024	64
Tabel 3.2 Tabel IDG Tahun 2020-2024	65
Tabel 3.3 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DP2PA Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	70
Tabel 4.1 Tabel Rencana Kerja DP2PA Tahun 2026	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Samarinda dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan



yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian wilayah, penegasan karakteristik, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait;



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;



19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
35. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
37. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0005/300.01 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
38. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor: 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;



39. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Dan Menteri Sosial Republik Indonesia Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

- Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009
- Nomor : 148 A/A/JA/2009
- Nomor : B/45/XII/2009
- Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009
- Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009
- Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas Perangkat Daerah dan hasil dari Musrenbang yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026.



1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.3 Program dan Kegiatan



**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2025, telah memenuhi target yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, hal ini dapat dilihat dari kinerja tahun anggaran 2025 secara garis besar sudah tercapai dari rencana target yang diharapkan. Tidak tercapainya target maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penghematan dan efisiensi dana kegiatan;
2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan padahal sudah diproyeksikan akan tercapai pada pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diprediksi permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan Pelaksanaan PPRG;
2. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan;



3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Masih rendahnya peran ibu dalam pendidikan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Masih dimungkinkan tinggi kasus kekerasan perempuan dan anak;
2. Masih dimungkinkan penurunan perkawinan usia anak;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak;
4. Meningkatnya layanan pencegahan, penanganan dan rujukan dalam kasus kekerasan perempuan dan anak;
5. Meningkatnya peran serta Perangkat Daerah dalam melaksanakan Implementasi PUG melalui PPRG dan digunakan dalam mengambil kebijakan;
6. Masih dimungkinkan naiknya peringkat Kota Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Melakukan advokasi untuk menambah anggaran pemenuhan sarana prasarana yang mendukung Kota Layak Anak;
2. Melaksanakan inovasi percepatan implementasi PUG yaitu GESIT (*Gender Budget Analysis With Simple Think*);
3. Membuat regulasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Wali Kota yang mengatur tentang



- pelaporan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak Kota Samarinda dengan sasaran tempat kerja, rumah tangga dan fasilitas umum;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas, UPTD PPA dan Puspaga agar dapat melaksanakan pelayanan yang standar, profesional dan komprehensif dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum agar dapat berdepan aktif dalam pembangunan;
 6. Melakukan kerjasama dan memperluas jejaring dengan OPD, instansi vertikal, Organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan orkestrasi dalam mengintegrasikan kegiatan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan OPD, instansi vertikal, Organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa untuk mewujudkan Samarinda Menuju Kota Layak Anak, Samarinda Ramah Perempuan dan Ramah Anak, serta Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban.



Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Samarinda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	11,5%	-	-	-	-	10,5%		
	2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50,05%	-	-	-	-	49,71%		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG		51 PD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG						150 Orang	150 Orang	100%
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota						150 Orang	150 Orang	100%
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	40 Lembaga	10 PD	40 PD	40 PD	100%			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	250 orang	25 Organisasi	250 orang	250 orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	40 Lembaga		25 Organisasi	25 Organisasi	100%	2 Organisasi	2 Organisasi	100%
	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	40 Lembaga		25 Organisasi	25 Organisasi	100%	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan						2 Layanan	2 Layanan	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						1 Lembaga	1 Lembaga	100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						150 Orang	150 Orang	100%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	200 orang	-	-	-	-			
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 orang	-	-	-	-			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	91,11%					84,21%	51,96%	
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	90 kasus	-	120 Kasus	90 Kasus	75%	80 Kasus	223 Kasus	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	-	-	-	-			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100%
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	3 Lembaga	-	-	-	-			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	3 Lembaga	50 orang	1 laporan	1 laporan	100%			
Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapat pendampingan	60 Orang	-	-	-	-			
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Bimtek	70 Orang	-	-	-	-			
Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	-	-	-	-			
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak									
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 Orang	45 orang	70 kasus			0.034 Persen	0.034 Persen	100%
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan								



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan						200 Orang	119 Orang	59,5%
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 Orang	-	-	-	-			
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 Orang	-	-	-	-			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	-					2 Lembaga	2 Lembaga	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-					3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	-					31 Orang	31 Orang	100%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-					1 Dokumen	1 Dokumen	100



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	5 Layanan	-	-	-	-	5 Layanan	5 Layanan	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 lembaga	-	-	-	-	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	-					1 lembaga	1 lembaga	100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-					5 Orang	5 Orang	100%
Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga	-	-	-	-			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	350 Keluarga	-	-	-	-	5 Layanan	5 Layanan	100%
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-					5 Layanan	5 Layanan	100%
layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	350 orang	-	-	-	-	-	-	-
Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	50 orang	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	67%	-	-	-	-	42%		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	-
Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang di advokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	4 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) Kegiatan / (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-(5+_7+_9)*	11-(10/4)*
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64	-	-	-	-	63	68,27	108,3%
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Dokumen KLA	7 Dokumen	30 organisasi	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-					40 Organisasi	40 Organisasi	100%
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-					7 Dokumen	7 Dokumen	100%
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	-	-	-	-	-	-	-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	25 Lembaga	110 orang	1 laporan	1 laporan	100%	20 Lembaga	20 Lembaga	100
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-					1 Dokumen	1 Dokumen	100
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-					1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-					1 Dokumen	1 Dokumen	100
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	4 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	89,47	-	-	-	-	88,24		
	2.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	82,53	-	-	-	-	81,16		
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	115 Kasus	3 dokumen	125 kasus	126 kasus	100.08%	120 kasus	180 kasus	150%
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	-					4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan Kab/Kota	Jumlah Pengambil kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga					2 Lembaga	2 Lembaga	100%
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-					80 orang	80 orang	100%
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	80 Orang	-	-	-	-	-	-	-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak									
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 Anak					1,60%	0,9979%	62,37%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	-					85 Orang	219 Orang	257,65%
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-					7 Layanan	7 Layanan	100%
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	80 Orang	-	-	-	-	-	-	-
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78	72	73	76	104,10%	77	76	99%
	2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	79	90	91,15	101,28%	92	90.28	98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	-					100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 Dok	7 Dokumen	7 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 Dok	14 laporan	14 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100%
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita acara	-	-	-	-	1 Berita acara	1 Berita acara	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	100%	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	38 Org	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	100	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Org	14 Dokumen	14 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	13 Dok	2 Laporan	2 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	-					44 Orang	55 Orang	125%
	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	100%	-	-	-	-	100%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	-	-	-	-	8 Orang	8 Orang	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan rencana kebutuhan barang	-					1 Laporan	1 Laporan	100%
	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	-	-	-	-	100%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-					1 Unit	1 Unit	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	-	4 unit	4 unit	100	3 unit	3 unit	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit					1 Unit	1 Unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-					4 Laporan	4 Laporan	100%
	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 Paket	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	3 Paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100%
Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	5 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket	100%
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	19 Lap	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	10 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-					2 Laporan	2 Laporan	100%
	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	
				Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8-(7 /6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	-					4 Laporan	4 Laporan	100%
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	-	-	-	-	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	13 unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	13 unit	33 Unit	33 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	2 unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%

Samarinda, 18 Februari 2026

Kepala Dinas



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd

NIP. 196707131991031013



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan Pelayanan tahun-tahun sebelumnya. sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya.

Dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Renstra telah menghasikan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pelayanan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di daya gunakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sasaran program kegiatan tahun 2026 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda memiliki 2 (dua) acuan yaitu ;

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010.



2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan prioritas/ acuan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan melalui tahapan yang sudah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 masing-masing bidang melaksanakan kegiatan, yaitu dengan melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD)

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat kabupaten/Kota

**Tabel 2.2 (T-C 30)**[illegible]



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

No Urut/ Bidang Urut/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program Daerah/ Urutan/ Bidang/ Urutan/ Pembelatan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Output/ Dampak	Target Kinerja dan Anggaran RPD Kota Tahun berjalan/ dibekukan (2025)	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Kota yang Dibekukan (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kota Tahun 2025	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Kota Tahun 2025 (%)		Aspek tercapai dan tidak tercapai program (2025)	Faktor pendukung/penghambatnya					
				K	Rp	Sumber Data 1	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Data 2	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Data 3	K	Rp	Faktor Pendukung			Faktor Penghambat	K			Rp	K	Rp	K	Rp
2.0.1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.000.000	PAO				2.400.000			PAO					1.820.000						1.316.000		31.820.000	100	91,08		
2.0.1.1	2.01	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibekukan	5 Paket				2	Tersedianya Anggaran	Paket Mohor Baru	1			Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan	1			Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 3 ini, realisasi baru akan tercapai pada Tahun 4 sesuai dengan anggaran kas yang ada		1			5		100			1. Belum terlaksananya program anggaran untuk kegiatan non-fiskal (pengeluaran kaspius SDM, sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	
2.0.1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengisian dan Pengisian			31.218.000	PAO				9.975.000			PAO					8.845.000						20.815.000		60.811.000	100	92,1		
2.0.1.1	2.01	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengisian yang Dibekukan	4 Paket				1	Anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang menghambat kegiatan yang terhambat di Tahun sebelumnya				Tersedianya anggaran	Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan ini di Tahun 2	2			tidak akan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan hingga ada akan terhambat dalam pelaksanaan RPD, namun realisasi target akan diperoleh baru setelah Tahun 4		1			4		100			1. Belum terlaksananya program anggaran untuk kegiatan non-fiskal (pengeluaran kaspius SDM, sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	
2.0.1.1	8	Realisasi Kurangnya Tema			15.000.000	PAO				4.440.000			PAO					3.832.000						13.062.000		25.062.000	100	87,08		
2.0.1.1	2.01	8	Jumlah Laporan Realisasi Kurangnya Tema	2 Laporan				1	Anggaran tersedia	Adanya efisiensi anggaran				Tersedianya Anggaran pada sub kegiatan yang dibekukan	Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada pelaksanaan kegiatan di Tahun 2	1			Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 3		0			2		100			1. Belum terlaksananya program anggaran untuk kegiatan non-fiskal (pengeluaran kaspius SDM, sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

No Urut/ Bidang Urut/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Output/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPDA Kota Tahun berjalan diawak(2025)	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDA Kota yang Diawak(2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDA Kota Q4 Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPDA tahun 2025)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPDA Tahun 2025 (%)		Keterangan Kecapaian dan Terdapat dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendukung/penghambatnya			
				K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung			Faktor Penghambat	K			Rp	K	Rp
2	1	1.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			136,497,000		44,382,784					62,164,275				47,763,284					108,118,167		178,725,167	100	98,37		
2	1	1.01	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disubmisiikan					1					1				0					2			100			
2	1	1.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			176,497,000	PAO	16,496,784			PAO		10,312,175			PAO	24,179,284			PAO		119,952,167		120,119,167	100	98,61		
2	1	1.01	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disubmisiikan					1	Anggaran tersedia	Human Error			1	Tersedianya anggaran pada Sub Kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan				1	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 1		3			100		1. Belum melaksanakn program anggaran untuk kegiatan non-fiskal (penggiatan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya kualitas pendamping bagi pelayanan publik seperti yang terdapat, serta kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	
2	1	1.01	4)Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor			110,000,000	PAO	27,000,000			PAO		26,150,000			PAO	43,384,000			PAO		140,166,000		218,166,000	100	98,76		
2	1	1.01	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Urutan Kantor yang Disubmisiikan					3	Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini	Adanya Error ini anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada Tahun ini Adanya aplikasi baru teknik persipahan			4	Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2				2	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 3 namun realisasi target kinerja memang bisa terrealisasi pada Tahun 3 ini yang akan 3 laporan pada tahun ini		12			100	2. Belum melaksanakn program anggaran untuk kegiatan non-fiskal (penggiatan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi). 3. Minimnya kualitas pendamping bagi pelayanan publik seperti yang terdapat, serta kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100		98,37			
Predikat Kinerja																							SF		SF			



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ (Output) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPJG Kota Tahun berjalan diwujudkan (2025)	Tahun 1						Tahun 2						Tahun 3						Tahun 4						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJG Kota yang Direalisasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota (1 Tahun 2025 Realisasi Anggaran RPJG Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RPJG Tahun 2025 (%)	Alokasi tercapai dan tidak tercapai program (2025)	Faktor pendukung/penghambatnya		
					K	Rp	Sumber Dana 1	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana 2	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana 3	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana 4	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	0	2	PROGRAM PENGARUSAHAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			392,297,833			40,239,860						12,035,000				143,040,180							176,000,000			371,336,000			1,476,912,380	100	94.9			
1	0	2		Persentase Anggaran Responsif Gender (RAG)	30.53 %			9.95							0				0							1.401			100						Dukungan sebagai besar PD dan seluruh Kecamatan		
1	0	2		Tingkat Partisipasi Kegiatan Kerja (TPAK) Perempuan	62.72%			0							0				0						54.15			393.00						Capaian kinerja melebihi target. Dapilkan yang diharapkan adalah capaian tahun 2024			
1	0	2.01	Pelentangan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Jumlah Pemenuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			130,038,833			27,596,360						8,195,000				38,337,160							55,434,500			121,543,000			616,690,051	100	93.74			
1	0	2.01	Jumlah Dokumen Pembangunan PUG	Dokumen				0							1				1							1			3					100			
1	0	2.01	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			64,466,833	PAO		13,596,360					PAO		4,195,000			PAO	1,370,000					PAO	38,360,000			57,824,360			159,966,760	100	88.46			
1	0	2.01	2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				0		Dukungan Pemrograman Perangko Daerah SDM Fiscal Point, Perencanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai Program terlintas	Proses Perencanaan dan sinkronisasi pada Bulan Maret			1		Dukungan sebagai terlintas	Tidak ada hambatan		1							0		0	3					100			
1	0	2.01	6. Kebijakan Kegiatan dan Pendampingan Peningkatan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			37,532,000	PAO		14,400,000					PAO		0			PAO	12,138,000					PAO	9,397,500			35,937,500			35,937,500	100	94.74			
1	0	2.01	6. Jumlah 5200 yang memperoleh akses kegiatan dan Pendampingan PUG	250 Orang			40			Dana Dukung Penyusunan Dokumen Analisis Gender Data Capaian Program/Kegiatan, Data Makro terkait Program/Kegiatan terlintas	Sebelum kondisi pada Perangkat Daerah yang terlintas sebagai terlintas yang karena tidak terlintas pada program/Kegiatan terlintas			40		Dukungan Peta Peta Pemetaan PD, Dana PUG (Kampung, BUKU PUG, Ummid, dll)	Pembayaran kegiatan makanan dan minuman rapat terlintas, namun sudah diinformasikan kepada Pihak Pembayar		40						0		0	150					100				
1	0	2.01	8. Sosialisasi kegiatan peningkatan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			26,570,000	PAO		0					PAO		4,000,000			PAO	16,637,160					PAO	7,364,000					26,591,160	100	99.73				
1	0	2.01	8. Jumlah peserta sosialisasi kegiatan peningkatan PUG tingkat Kabupaten/Kota	250 Orang			0			Materi bahan promosi (Leaflet & Buku Saku) terlintas 1). Terlintas waktu dan SDM sehingga bahan promosi dibuatkan sampai terlintas desain. 2). Kegiatan dikurangi "GDS Master Class" direncanakan berjalan di TW 3 harus menyesuaikan urutan prioritasnya.			100			Kegiatan ini sudah terlaksana	Proses penyusunan makanan dan minuman rapat dibayarkan dibayar sebagai terlintas (Tahun 1)		25			Pembayar makan minum kegiatan terlintas waktu, koordinasi berjalan baik dibayar oleh pengelola data yang profesional				0		0	150					100			
Rata-rata capaian kinerja (%)																																		100	92.74		
Predikat Kinerja																																		57	57		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode Urutan/ Kategori Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Output)/ Hasil (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD Kota Tahun berjalan (Desain/2025)	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Kota yang Desain/2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Kota (2 Tahun 2025 Keterkaitan RPMD Tahun 2025)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD Tahun 2025 (%)	Akun tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendukung/penghambatnya		
				K	Rp	Sumber Dana	K 1	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K 2	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K 4	Rp	Faktor Pendukung						Faktor Penghambat	
1	1	1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota			36.857.000		5.534.500			0			24.852.500		3.600.000			34.087.000	422.696,731	100	93,41				
1	1	1		Jumlah/Keterwakilan Perempuan di Perlemen, Perempuan sebagai Tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Penguasaan Kerja	50 orang			4			20			0		20			50		100					
1	1	1	Analisis Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 2/Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			56.857.000/PAD		5.534.500			PAD		0		PAD	24.852.500	3.600.000			34.087.000	422.696,731	100	93,41			
1	1	1	2	Jumlah/Organisasi Masyarakat yang Mendapat Mandiri dan Penguasaan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	2 Organisasi			0	Kerjasama lintas sektor	1. Adanya efikasi anggaran sehingga terdapatnya kegiatan. 2. Adanya mitra berkolaborasi kegiatan organisasi perempuan (Organisasi PKMA).		0	Adanya KAT Terkini kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Sesuai anggaran kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di Tahun III		2	Adanya kebijakan daerah yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta adanya anggaran yang memadai untuk implementasinya	Data organisasi yang didapat tidak di validasi oleh PK Paksi	0	Dukungan Pempropen PK Dukungan Ormas Perempuan	Mayoritas organisasi Perempuan belum mendapatkan diri di Kabupaten Kota Samarinda	2	100	Mayoritas organisasi Perempuan belum mendapatkan diri di Kabupaten Kota Samarinda		
Rekapitulasi Kinerja (%)																						100	93,41			
Predikat Kinerja																						ST	ST			
1	1	1	1	Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota		233.340.000		7.210.000					3.840.000			87.760.500		116.976.500			215.706.000	436.475,600	100	96,56		
1	1	1		Jumlah/Lembaga Pemberdayaan Perempuan	21 Layanan			0				0				1		1			2		100			
1	1	1	1	Analisis Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 1 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota		37.775.000/PAD		5.534.500			PAD		0			PAD	17.046.000	34.200.500			36.768.500	351.253.500	100	97,34		
1	1	1	1	Jumlah/Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota yang Mendapat Mandiri dan Pendampingan	1 Lembaga				Terselenggara anggaran	1. Adanya efikasi anggaran sehingga terdapatnya kegiatan.				Terselenggara anggaran	Sesuai anggaran kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di bu di		1	Ketersediaan sumber daya keuangan, manusia, dan infrastruktur yang memadai memungkinkan lembaga penyedia untuk menjalankan program-programnya secara efektif dan berkelanjutan.	Ketersediaan dana, tenaga ahli, dan fasilitas yang memadai dapat mendukung terwujudnya lembaga untuk memberikan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.		1	adanya narasumber, adanya pihak ketiga.	Perumputan beban kegiatan di Tahun III karena adanya penyusunan jadwal koordinasi antar lembaga di Tahun III.	1	100	Perumputan beban kegiatan di Tahun III karena adanya penyusunan jadwal koordinasi antar lembaga di Tahun III.
1	1	1	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 2/ Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota		185.607.000/PAD		1.610.000			PAD		3.840.000			PAD	70.714.500	102.770.000			178.917.500	275.224.500	100	96,42		
1	1	1	1	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	220 Orang				Terselenggara anggaran	Adanya efikasi anggaran sehingga terdapatnya kegiatan.		25	Sesuai anggaran luas kegiatan yang dilaksanakan di Tahun III	1. Terjadi pengurangan anggaran 2. Kegiatan belajar Makanan & Minuman Rapat Sosialisasi Permodalan Nasional Madani (PMMD) bagi mitra DPRD, Pengalihan Pengantar PKMA, Pembalakan Pengantar PKMA, baru didapatkan di Bulan Juli (Tahun III)		75	Adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di tingkat daerah maupun nasional sangat penting kebijakan ini memberikan landasan hukum dan legitimasi bagi lembaga penyedia layanan untuk menjalankan program-programnya berkelanjutan.	Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat mendukung terwujudnya lembaga untuk memberikan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.		50	adanya dukungan tenaga ahli, Pemasaran Model Madani (PMMD), Bank Indonesia, Dinas Perempuan Kota Samarinda,	Perumputan jadwal pelaksanaan kegiatan selama pada Tahun III dikarenakan adanya proses penyusunan administrasi dan struktur kegiatan lembaga pada tahun sebelumnya.	250	100	Perumputan jadwal pelaksanaan kegiatan selama pada Tahun III dikarenakan adanya proses penyusunan administrasi dan struktur kegiatan lembaga pada tahun sebelumnya.	
Rekapitulasi Kinerja (%)																						100	96,56			
Predikat Kinerja																						ST	ST			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN TERJENJAS DAN LANGKAH DARI SELURUH KEGIATAN PROGRAM 2																						100	94,9			
Predikat Kinerja																						ST	ST			



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Output/ Outcome/ Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPJN Kota Tahun berjalan desentral (2023)	Tahun 1					Tahun 2					Tahun 3					Tahun 4					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJN Kota yang Desentral (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota 4 Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJN tahun 2023)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)	Akuan tercapai dan tidak tercapainya program (2023)	Faktor pendukung/penghambatnya				
				K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp						Faktor Pendukung	Faktor Penghambat		
2	9.4		PROGRAM Peningkatan Kualitas Keluarga			184.545.500		15.106.200					10.775.000				83.646.750					12.485.200			184.382.200	754.756.432	100	99,81				
2	9.4			Peningkatan Kualitas (Prasyarat) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	5,0 Capaian			1					1				1						1			100			Akunya perubahan indikator kerja program dan target indikator kerja program pada RPJPD 2023, yang tidak ada persentase pencapaian anak menjadi Peningkatan Kualitas (Prasyarat) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (5 Capaian)			
2	9.4	2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemedia Layanan Perbaikan Kualitas Keluarga dalam Menwujudkan KSD dan Hak Anak yang Wilayah Kerja yang Daerah Kabupaten/Kota			84.545.500		15.000.000					15.291.750				41.654.000							12.378.000		84.408.750	135.294.380	100	99,84			
2	9.4	2.02		Jumlah Lembaga Pemedia Layanan Perbaikan Kualitas Keluarga yang mendapatkan subdasi dan pendampingan	2 Lembaga			0					0				0						2			100						
2	9.4	2.02	Melakukan Kegiatan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Pemedia Layanan Perbaikan Kualitas Keluarga Target Daerah Kabupaten/Kota			37.777.500 PAD		4.811.000					PAD				31.404.000						PAD		900.000		37.347.000	170.294.384	100	99,85		
2	9.4	2.02	1	Jumlah Lembaga Pemedia Layanan Perbaikan Kualitas Keluarga yang mendapat subdasi dan pendampingan	1 Lembaga			0	Tersedianya anggaran	Pada Tahun berjalan ada kegiatan, kegiatan baru dilaksanakan di Tahun selanjutnya sesuai dengan jalur anggaran kas			0	Koordinasi dan komunikasi dengan Program	Anggaran kas tersedia di Tahunan II		1	Tersedianya Dukungan Sumber daya manusia	Dengan terdapatnya efisiensi anggaran terapan di berbagai aspek memulainya indikator kinerja yang persentase dengan terdapatnya indikator efisiensi sehingga mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja tersebut.				0	tersedianya data dalam penyusunan laporan	data kiner yang masuk belum teranalisis karena keterbatasan SDM	1		100		data kiner yang masuk belum teranalisis karena keterbatasan SDM		
2	9.4	2.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 2 Pemedia Layanan Perbaikan Kualitas Keluarga Target Daerah Kabupaten/Kota			47.268.000 PAD		10.200.000					PAD				10.200.000						PAD		11.470.000		47.261.750	165.696.237	100	99,99		
2	9.4	2.02	2	Jumlah Lembaga Pemedia Layanan Perbaikan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang			1	Tersedianya anggaran	Tidak ada hambatan			0	Koordinasi dan komunikasi dengan Program	Anggaran tersedia di Tahunan I		0	Tersedianya Sumber Daya	Efisiensi anggaran tidak dibarengi dengan pencapaian target indikator kinerja tidak ada akses untuk memulainya target indikator kinerja pada RPJPD				4	Tersedianya Data dalam penyusunan laporan	data kiner yang masuk belum teranalisis karena keterbatasan SDM	5		100		data kiner yang masuk belum teranalisis karena keterbatasan SDM		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100		99,84						
Predikat Kinerja																								3F		3F						
2	9.4	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Menwujudkan KSD dan Hak Anak yang Wilayah Kerja yang Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		20.110.200					18.333.250				41.411.750								20.110.200	99.973.432	100	99,97				
2	9.4	2.03		Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KSD dan Hak Anak	3 Layanan			1					1				1						2			100						
2	9.4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KSD dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerja yang Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000 PAD					PAD				18.333.250						PAD		20.110.200		99.973.432	100	99,97			
2	9.4	2.03	1	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KSD dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerja yang Daerah Kabupaten/Kota yang Terseleksi	3 Layanan			1	Komunikasi dan koordinasi dengan Mitra	Meningkatkan Terbitnya CDF dan RAS sehingga Terhambatnya Pendayagunaan Rotorasion Tenaga Ahli			1	Koordinasi dan Komunikasi dengan Program	Tidak Ada Penghambat karena Anggaran tersedia		1	Tersedianya anggaran kegiatan	Terdapat layanan yang kurang representatif karena 1 juta lebih dengan UPTD PPA				2	Tersedianya anggaran kegiatan	Terdapat layanan yang kurang representatif karena 1 juta lebih dengan UPTD PPA	5		100		Terdapat layanan yang kurang representatif karena 1 juta lebih dengan UPTD PPA		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100		99,97						
Predikat Kinerja																								3F		3F						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGKA RATA-RATA SELURUH KEBIDATAN (PROGRAM A)																								100		99,81						
Predikat Kinerja																								3F		3F						



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD Kota Tahun berjalan diakuisisi (2025)	Tahun 1						Tahun 2						Tahun 3						Tahun 4						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Kota yang Dewasakan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Kota (2 Tahun 2025 Makin Tahun Pelaksanaan RPD tahun 2025)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Tahun 2025 (%)	Klasifikasi tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendukung/penghambatnya			
				K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.0.5		PROGRAM PEKERJAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		45.453.000			2.724.000				7.185.380					12.154.000					24.000.140				45.384.520		262.559.520	100	98,99								
2.0.5			Tingkat Pembarukan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Uraian Penyusunan Kebijakan	42%			0				0				0						42				42			100						Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersedia, namun ada perubahan dalam indikator kerja program dan target indikator kerja program, maka di Tahun ini Realisasi target kinerja program baru dapat terrealisasi			
2.0.5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Pengujian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		45.453.000			2.724.000				7.185.380					12.154.000					24.000.140				45.384.520		262.559.520	100	98,99								
2.0.5	2.01		Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen			0				0				0						1				1			100									
2.0.5	2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota		45.453.000	PAO		2.724.000			PAO	7.185.380			PAO	12.154.000					PAO	24.000.140				45.384.520		262.559.520	100	98,99								
2.0.5	2.01	1	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen			0	Ketersediaan anggaran sub kegiatan penyediaan data gender dan anak	Tidak ada faktor penghambat		0	Ketersediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak	1. Adanya evaluasi anggaran yang mengakibatkan terlambatnya realisasi capaian kinerja dan kegiatan 2. Proses Pengumpulan dan Penyusunan Data Gender dan Anak dari 1 OPD dan Lembaga Terkait		0	Dukungan dari OPD untuk penyusunan dokumen data Gender dan Anak	Belum Optimalnya Pengumpulan Data Gender dan Anak sehingga dikurir dari 1 OPD pada OPD dan Lembaga Terkait		1	Dukungan dari OPD untuk Penyusunan dokumen data gender dan Anak	Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersusun di MIS pada TM IV	1				100							Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersusun di MIS pada TM IV				
Rata-rata capaian kinerja (%)																												100				98,99					
Predikat Kinerja																												ST				ST					
TOTAL NMT-AKTU CAPAIAN KINERJA DAN AKSESAN DAN SELURUH HASIL KINERJA PROGRAM																												100				98,99					
Predikat Kinerja																												ST				ST					



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



*Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2026*



2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih di hadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi integritas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2025-2029 sebagai berikut :

1. Masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak- hakanak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
2. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi *dan cyber crime*;
3. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
4. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
5. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota;



6. Masih Adanya Kasus TPPO;
7. Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRTN dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
8. Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang;
9. Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislative;
10. Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, dan Perempuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2026, yang terdiri dari 7 program dan 20 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tabel Terlampir).

Tabel 2.3 (T-C 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Samarinda

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	IKM	91	8,701,196,480	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	IKM	91	8,701,196,480	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	74.50	120,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	74.50	120,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	75,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	15,000,000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	15,000,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan	12 laporan	6,918,942,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan	12 laporan	6,918,942,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	6,166,697,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	6,166,697,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	702,245,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	702,245,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai	44 orang	204,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai	44 orang	204,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket	104,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket	104,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan	4 laporan	303,254,480	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan	4 laporan	303,254,480	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21,854,540	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	21,854,540	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21,854,540	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21,854,540	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	218,545,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	218,545,400	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	810,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	810,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	500,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	250,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	250,000,000	
	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	50,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	160,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	160,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	150,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 laporan	185,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 laporan	185,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	13 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	13 Unit	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayrkan pajak dan perizinannya	2 unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayrkan pajak dan perizinannya	2 unit	25,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Samarinda	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	68,69	785,924,387	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Samarinda	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	68,69	785,924,387	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	3 Dokumen	365,924,387	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	3 Dokumen	365,924,387	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan	150,023,460	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan	150,023,460	
	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	40 Lembaga	215,900,927	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	40 Lembaga	215,900,927	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	250 orang	420,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	250 orang	420,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Samarinda	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	40 Lembaga	150,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi	Samarinda	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	40 Lembaga	150,000,000	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	200 Orang	135,000,000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	200 Orang	135,000,000	
	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	135,000,000	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	135,000,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
3	Program Perlindungan Perempuan	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	572,334,000	Program Perlindungan Perempuan	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	572,334,000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	110 kasus	274,136,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	110 kasus	274,136,000	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	137,068,000	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KTP Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	137,068,000	
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	3 Lembaga	137,068,000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	3 Lembaga	137,068,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	2 lembaga	298,198,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	2 lembaga	298,198,000	
	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	60 Orang	137,068,000	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	60 Orang	137,068,000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	70 orang	137,068,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	70 orang	137,068,000	
	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	24,062,000	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	24,062,000	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Samarinda	persentase perkawinan anak	1,85%	819,545,250	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Samarinda	persentase perkawinan anak	1,85%	819,545,250	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga	145,675,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga	145,675,000	
	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga	145,675,000	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga	145,675,000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	300 keluarga	673,870,250	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	300 keluarga	673,870,250	
	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang	573,870,250	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang	573,870,250	
	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang	100,000,000	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang	100,000,000	
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 dokumen	327,818,100	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 dokumen	327,818,100	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 dokumen	327,818,100	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 dokumen	327,818,100	
	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	327,818,100			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	327,818,100	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Samarinda	Kota Layak Anak	800 s/d 900	1,201,999,700	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Samarinda	Kota Layak Anak	800 s/d 900	1,201,999,700	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Dokumen KLA	7 dokumen	901,999,700	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Dokumen KLA	7 dokumen	901,999,700	
		Samarinda	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	130,000,000	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	130,000,000	
		Samarinda	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	145,636,200	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	145,636,200	
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	100,000,000	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	100,000,000	
	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	526,363,500	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	526,363,500	

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	20 lembaga	300,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	20 lembaga	300,000,000	
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	4 Lembaga	200,000,000	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	4 Lembaga	200,000,000	
	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	100,000,000	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	100,000,000	
	Program Perlindungan Perempuan (UPTD)	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	670,000,000	Program Perlindungan Perempuan (UPTD)	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	670,000,000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 orang	670,000,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 orang	670,000,000	
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 orang	335,000,000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 orang	335,000,000	
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 orang	335,000,000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	84 orang	335,000,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)	Samarinda	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.60%	265,696,000	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)	Samarinda	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.60%	265,696,000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 anak	265,696,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 anak	265,696,000	
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	80 Orang	180,000,000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	80 Orang	180,000,000	
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 orang	85,696,000	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	150 orang	85,696,000	
					13,344,513,917					13,344,513,917	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda maka sejak tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tupoksi menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang tingkat Kecamatan telah dipindahkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu sejak tahun 2022 tidak dilakukan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar Tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Pembangunan Daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) PBB, salah satu indikator kesejahteraan Negara adalah kesetaraan gender. Negara belum dikatakan maju bila perempuan dan anak belum berada di ranah aman. Dalam banyak hal perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara



ekonomi masuk akal. Mengharusutamakan masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika Gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2025-2029, dengan mendukung peningkatan pencapaian hasil salah satu program unggulan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu *Program Three Ends*, Program 3 End meliputi *End Violence Against Woman And Children* (akhiri kekerasan pada wanita dan anak), *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia), *End Barriers to Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi), dengan mengadakan sosialisasi, penanganan kasus korban kekerasan dengan konseling serta rumah aman. Juga menekankan perlunya peran media massa dalam mendukung isu responsif gender dan memahami tentang hak anak.

Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan program 3 end ini yaitu :

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat
- Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
- Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah
- Dukungan yang massif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat).

2. Akhiri Perdagangan Manusia



- Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia
- Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO
- Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai

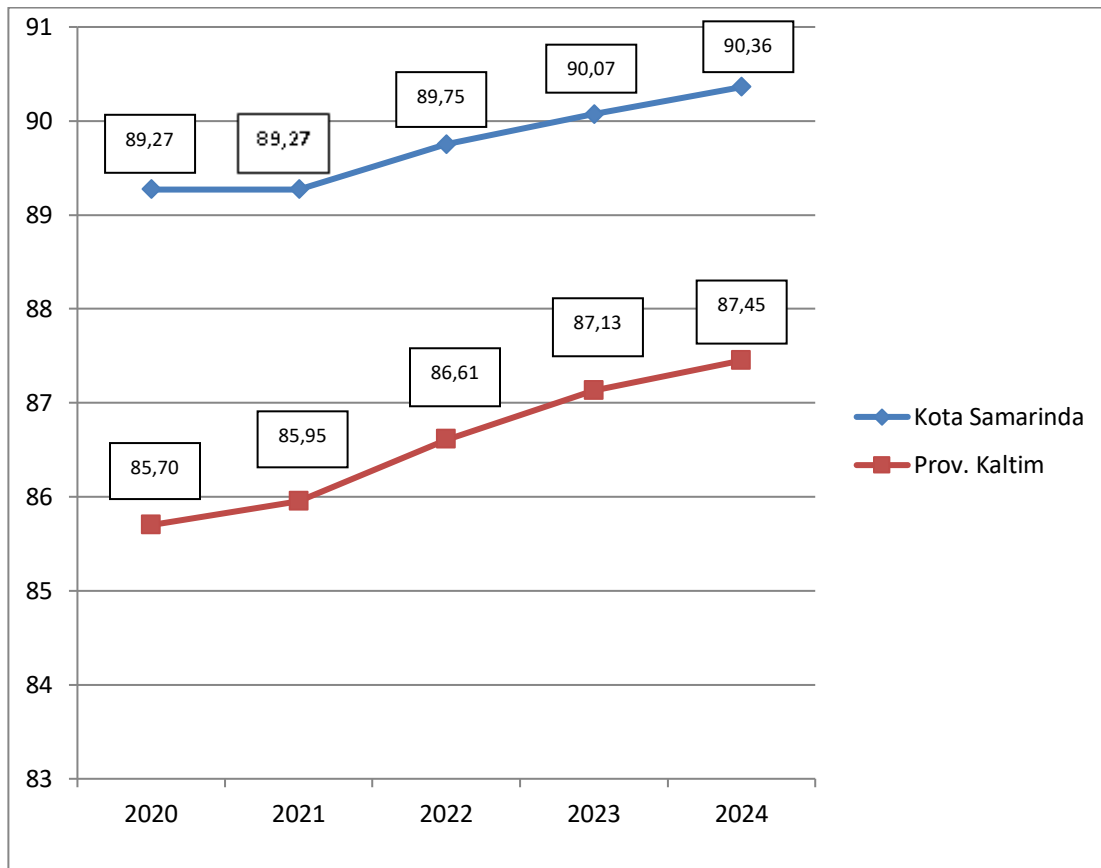
3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
- Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
- Menyiapkan sistem permodalan alternative bagi perempuan pelaku usaha mikro
- Mengembangkan dukungan dana / sarana alternatif bagi perempuan inovator

Akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi yang semakin baik terbukti dengan pencapaian IPG yang semakin baik dan meningkat setiap tahun. Berikut dapat dilihat pencapaian IPM , IPG dan IDG Kalimantan Timur dibawah ini :



Tabel 3.1
Diagram IPG Tahun 2020-2024

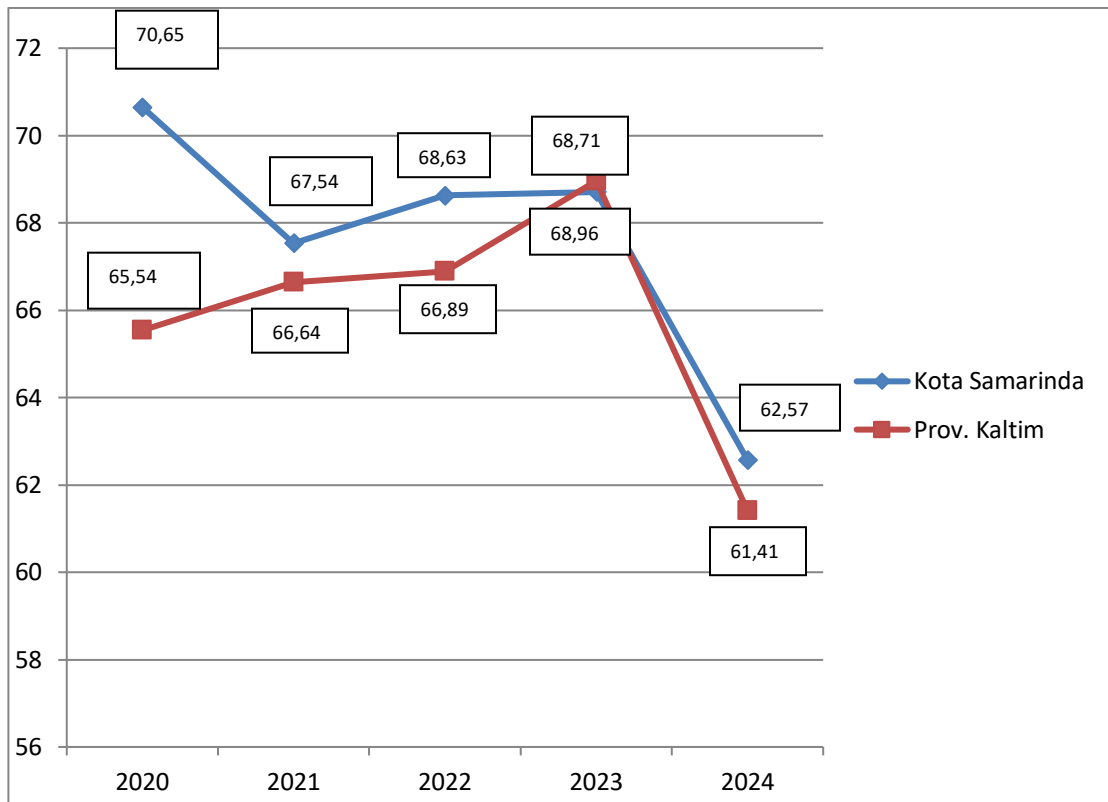


Sumber : BPS Kota Samarinda

Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi kenaikan sebesar 0,48 dari 89,27 menjadi 89,75 pada tahun 2022, kenaikan 0,32 dari 89,75 menjadi 90,07 pada tahun 2023 dan kenaikan sebesar 0,29 dari 90,07 menjadi 90,36 pada tahun 2024.



Tabel 3.2
Diagram IDG Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Samarinda

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2020 hingga 2024 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Samarinda cukup tinggi.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda juga ditentukan dengan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai, yaitu;

1. Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ;

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari sekretariat dan 4 bidang pada Renja Tahun 2026 terdiri 5 program, 20 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan adalah :

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota



1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Atau Hukum, Atau Sosial, Dan Atau Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Layanan Konsultasi Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota



**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.



Tabel 3.3 (T-C 33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027																
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	08	02	2	01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Kota Samarinda	3 Laporan	114,726,997	APBD Kota	-	3 Laporan	150,023,460		
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	08	02	2	02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Kota Samarinda	100 Orang	300,000,000	APBD Kota	-	100 Orang	135,000,000		
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
2	08	03	2	01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kota Samarinda	3 Lembaga	126,750,000	APBD Kota	-	3 Lembaga	137,068,000		
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	08	03	2	02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	84 orang	60,000,000	APBD Kota	-	84 orang	335,000,000		
2	08	03	2	02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota ((UPTD PPA))	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	84 orang	200,000,000	APBD Kota	-	84 orang	335,000,000		



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
2	08	04	2	03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	08	04	2	03	0004	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	50 Orang	183,900,000	APBD Kota	-	50 Orang	573,870,250
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
2	08	07	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	08	07	2	03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kota Samarinda	100 orang	86,190,000	APBD Kota	-	100 orang	88,909,050
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (UPTD)								
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)								
2	08	07	2	02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	80 orang	234,060,000	APBD Kota	-	80 orang	180,000,000





Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		PAGU TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)						(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2	08	01				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	08	01	2	02		0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	40 orang/bulan	5,844,816,000	APBD Kota	-	-	40 orang/bulan	6,166,697,000
2	08	01	2	02		0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	14 Dokumen	376,696,000	APBD Kota	-	-	14 Dokumen	702,245,000
2	08	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	08	01	2	06		0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	3 paket	10,000,000	APBD Kota	-	-	3 Paket	6,000,000
2	08	01	2	06		0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda	4 paket	20,000,000	APBD Kota	-	-	4 paket	21,854,540
2	08	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	08	01	2	07		0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda	2 unit	220,800,000	APBD Kota	-	-	2 unit	500,000,000
2	08	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	08	01	2	08		0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda	3 laporan	360,000,000	APBD Kota	-	-	3 laporan	10,000,000
2	08	01	2	08		0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda	11 Laporan	736,936,032	APBD Kota	-	-	11 Laporan	150,000,000
2	08	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	08	01	2	09		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda	13 unit	20,450,000	APBD Kota	-	-	13 unit	100,000,000
2	08	01	2	09		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda	2 unit	56,000,000	APBD Kota	-	-	2 unit	25,000,000
2	08	01	2	09		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda	33 unit	25,000,000	APBD Kota	-	-	33 unit	10,000,000
2	08	01	2	09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Samarinda	1 unit	55,000,000	APBD Kota	-	-	1 unit	50,000,000
							Total					9,031,325,029				9,676,667,300



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

4.1 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari sekretariat dan 4 bidang pada rencana kinerja tahun 2026 terdiri 5 program, 12 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut ini:



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA							9,031,325,029.00						9,942,293,050.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8,537,265,029.00							8,826,597,050.00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8,537,265,029.00							8,826,597,050.00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			78,00 Nilai 93,00 Nilai	7,725,698,032.00					-		7,741,796,540.00	
		[Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82 97	76 91.15	77 92	78 93	7,725,698,032.00	-	-	-	-	-	-	7,741,796,540.00	-
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dibuat dibagi jumlah laporan yang direncanakan dibuat dikali 100 Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu	-			Orang Perse undefined Persen	6,221,512,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pegawai DP2PA Kota Samarinda	-	6,868,942,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5,844,816,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		6,166,697,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	376,696,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		702,245,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-			undefined Persen	30,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	27,854,540.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		6,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	20,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		21,854,540.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	-			undefined Persen	220,800,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sarana Prasarana DP2PA	-	500,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	220,800,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sarana Prasarana DP2PA		500,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP	-			undefined Persen	1,096,936,032.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	160,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	360,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	736,936,032.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	-			undefined persen	156,450,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sarana Prasarana DP2PA	-	185,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	20.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sarana Prasarana DP2PA		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	56.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sarana Prasarana DP2PA		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sarana Prasarana DP2PA		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sarana Prasarana DP2PA		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-			11,6 % 50,05 %	414,726,997,00						-	285,023,460,00	
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	14 51	49,69 9,00	10,50 49,71	11,6 50,05	414,726,997,00	-	-	-	-	-	-	285,023,460,00	-
	2.08.02.2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan PUG	-			3 Dokumen	114.726.997,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	OPD, Lembaga Kemasyarakatan	-	150.023.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				3 Laporan	114.726.997,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	OPD, Lembaga Kemasyarakatan		150.023.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	-			250 Orang	300,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	135,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan				100 Orang	300,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		135,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-			91.11 %	126,750,000.00					-	-	137,068,000.00	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.00	68.69	64.21	61.11	126,750,000.00	-	-	-	-	-	-	137,068,000.00	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	-			90 Kasus	126,750,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat	-	137,068,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				3 Lembaga	126,750,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat		137,068,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-			5 Layanan	183,900,000.00						-	573,800,000.00	
		[Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak]	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	8	5	5	5	183,900,000.00	-	-	-	-	-	-	573,800,000.00	-
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	-			350 keluarga	183,900,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	masyarakat	-	573,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA	Lingkup Kabupaten/Kota													
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota				350 Orang	183,900,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Membangun Sektor Pendidikan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	masyarakat	-	573,800,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-			82,53 Indeks 89,47 %	86,190,000.00					-	-	88,909,050.00	
		[Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.00	69.57	68.24	69.47	86,190,000.00	-	-	-	-	-	-	88,909,050.00	-
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	-			2 Lembaga	86,190,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	Masyarakat, OPD, Stakeholder	-	88,909,050.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				80 Orang	86,190,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing	Masyarakat, OPD, Stakeholder	-	88,909,050.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						494,060,000.00							1,115,696,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						494,060,000.00							1,115,696,000.00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						494,060,000.00							1,115,696,000.00	
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-			91.11 %	260,000,000.00						-	670,000,000.00	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	68.69	64.21	61.11	260,000,000.00	-	-	-	-	-	-	670,000,000.00	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-			70 Orang	260,000,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	670,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				84 orang	60,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		335,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				84 orang	200,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		335,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-			82,53 Indeks 89,47 %	234,060,000.00						-	445,696,000.00	
		[Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 88.00	69.57 79.79	81.16 88.24	82.53 89.47	234,060,000.00	-	-	-	-	-	-	445,696,000.00	-
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	-			80 Anak	234,060,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	265,696,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				80 Orang	234,060,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		180,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
			J U M L A H					9,031,325,029.00								



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kota Samarinda dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, selama tahun 2026 telah tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2026 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama satu tahun anggaran serta merupakan implementasi tentang RENJA di tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini, telah dapat menggambarkan segala upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Namun masih dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan pada tahun mendatang, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dengan terus menerus melakukan evaluasi, monitoring dan inovasi sehingga dapat tercipta kinerja yang lebih baik.